



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/PERMEN-KP/2018
TENTANG
RENCANA KERJA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dan merupakan pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- (2) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I: Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2019, serta Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019;
 - b. Lampiran II: Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019; dan
 - c. Lampiran III: Komponen Kegiatan Utama Tahun 2019,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 dijabarkan lebih rinci dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2019 merupakan pagu anggaran berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-166/MK.2/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi unit kerja eselon I dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2019.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, pimpinan unit kerja eselon I melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melakukan penyesuaian/perbaikan rencana kerja.
- (3) Pimpinan unit kerja eselon I wajib menyampaikan laporan secara tertulis perkembangan pelaksanaan rencana kerja setiap 4 (empat) bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Dalam hal terdapat penyesuaian/perbaikan rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), penyesuaian/perbaikan tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1881

Salinan sesuai dengan aslinya
Ke Biro Hukum dan Organisasi,



Tini Martini

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/PERMEN-KP/2018
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2019

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renja KKP) Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun kelima pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Renstra KKP Tahun 2015-2019), Visi KKP Tahun 2015-2019 adalah menjabarkan arahan Presiden bahwa “Laut adalah Masa Depan Bangsa” yaitu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Misi KKP adalah Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 dilakukan berdasarkan *money follows* program prioritas.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2019 difokuskan pada:

1. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi:
 - a) operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan moda pengawasan yang terintegrasi;
 - b) penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran;
 - c) penenggelaman kapal ikan asing ilegal;
 - d) penguatan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*);
 - e) penguatan kerja sama regional maupun internasional; dan

- f) penerapan *Monitoring, Controlling, and Surveillance* (MCS) secara konsisten.
2. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui:
 - a) penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya);
 - b) penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan pengawasan lainnya;
 - c) pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
 - d) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
 3. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
 - b) meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;
 - c) meningkatkan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
 - d) meningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - e) mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan.

B. Indikator Kinerja dan Target Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir (kelima) pelaksanaan RPJM Tahun 2015-2019 dan Renstra KKP Tahun 2015-2019. Pada tahun 2019 indikator kinerja yang akan dicapai oleh KKP adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2019
I. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan		
1.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	56
2.	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan (%)	11
II. Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
3.	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	87
4.	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)	4
III. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan		
5.	Persentase pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (%)	60
6.	Persentase peningkatan ekonomi kelautan dan perikanan (%)	62
7.	Produksi perikanan (juta ton):	38,30
	1. Perikanan Tangkap (juta ton):	8,40
	2. Perikanan Budidaya (juta ton):	29,90
	a. Ikan	10,36
	b. rumput laut	19,54
8.	Produksi garam (Pugar dan Non-Pugar) (juta ton)	4,5
9.	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	9,5
10.	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	54,49
11.	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kelautan dan perikanan (Rp. miliar)	820
IV. Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Efektif		
12.	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	8
V. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan		
13.	Efektivitas tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan (%)	71
VI. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang profesional dan partisipatif		
14.	Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (%)	92
15.	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	76
VII. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian		
16.	Indeks kompetensi dan integritas	80
VIII. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal dan Mudah Diakses		
17.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	65

No.	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2019
IX. Terwujudnya Pranata dan Kelembagaan Birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima		
18.	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan	A
19.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3
X. Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel		
20.	Nilai Kinerja Anggaran	Baik (86)
21.	Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP (5)

C. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan, akan dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program sebagai berikut:

1. Program pengelolaan perikanan tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp619.122.765,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
 - a) bantuan kapal perikanan;
 - b) bantuan alat penangkapan ikan;
 - c) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang diidentifikasi dan/atau dikembangkan fasilitasnya;
 - d) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang diidentifikasi dan/atau ditingkatkan fasilitasnya;
 - e) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang diidentifikasi dan/atau ditingkatkan fasilitasnya;
 - f) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang diidentifikasi dan/atau ditingkatkan fasilitasnya;
 - g) bantuan premi asuransi nelayan;
 - h) fasilitasi kredit perikanan tangkap;
 - i) fasilitasi sertifikasi tanah nelayan (SeHAT);
 - j) Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kelembagaannya menjadi koperasi;
 - k) alokasi izin yang diberikan terhadap peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang tersedia;
 - l) perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya;
 - m) kelembagaan pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional;
 - n) lanjutan pelaksanaan kegiatan sentra kelautan dan perikanan terpadu;

2. Program pengelolaan perikanan budidaya sebesar Rp656.379.044.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
 - a) produksi benih ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut;
 - b) produksi induk unggul/calon induk unggul;
 - c) bantuan sarana prasarana dan percontohan perbenihan ikan (kebun bibit kultur jaringan);
 - d) sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
 - e) monitoring residu dan surveillance hama penyakit ikan;
 - f) bantuan sarana prasarana dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan yang terdiri dari excavator dan pengembangan irigasi/kawasan tambak;
 - g) sertifikasi bidang lahan budidaya;
 - h) bantuan asuransi usaha budidaya;
 - i) registrasi pakan dan obat ikan;
 - j) bantuan sarana dan prasarana percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari bioflok dan mina padi;
 - k) produksi pakan mandiri untuk bantuan dan operasional budidaya di UPT;
 - l) bantuan sarana prasarana dan percontohan pakan ikan mandiri (55 paket) yang terdiri dari bantuan mesin pakan mandiri dan bantuan bahan baku pakan;
 - m) lanjutan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (3 SKPT).
3. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sebesar Rp362.218.547.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
 - a) prasarana logistik ikan yang dibangun dan dimanfaatkan berupa *ice flake machine* kapasitas 5 ton (10 unit) dan dukungan operasional *start up cold storage* (cs);
 - b) sarana logistik ikan yang disediakan dan dimanfaatkan berupa kendaraan berpendingin;
 - c) promosi produk kelautan dan perikanan di pameran skala internasional;
 - d) sarana dan prasarana ikan yang dibangun berupa pasar ikan modern (1 unit) dan operasional *start up* pasar ikan modern;

- e) peralatan pemasaran yang disediakan dan dimanfaatkan berupa *ice flake machine* kapasitas 1,5 ton;
 - f) pameran promosi peningkatan konsumsi ikan konsumsi dalam negeri yang diikuti satker daerah;
 - g) sarana dan prasarana pengolahan hasil KP yang dibangun dan dimanfaatkan berupa sarana sistem rantai dingin (SRD) dan operasional *start up* ICS;
 - h) debitur sektor KP yang mendapatkan layanan pembiayaan Bank dan non Bank;
 - i) pelaku usaha KP yang mendapat fasilitas pelayanan usaha dan investasi;
 - j) wirausaha hasil KP yang dibentuk dan dibina;
 - k) sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan;
 - l) penanganan dan unit pengolahan produk hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina;
 - m) utilitas unit penanganan dan pengolahan produk hasil KP;
 - n) informasi Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (Stelina);
 - o) promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan);
 - p) pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.
4. Program pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sebesar Rp646.521.072.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
- a) operasional kapal pengawas;
 - b) operasional pesawat patroli;
 - c) awak kapal pengawas yang mumpuni dan memenuhi kualifikasi;
 - d) armada pengawas dan sistem pemantauan yang siap operasional;
 - e) operasional *speed boat/rigid inflatable boat/rubber boat*;
 - f) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP melalui supervisi dan monitoring Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam membantu kegiatan pengawasan SDKP;
 - g) bangunan/pos pengawasan yang dibangun;
 - h) perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel;

- i) forum koordinasi penanganan pelanggaran tindak pidana KP yang terselenggara;
 - j) peningkatan SDM Pengawasan SDKP, PPNS Perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - k) operasional Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara illegal (*illegal Fishing*);
 - l) kawasan konservasi perairan yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m) jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - n) pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o) pelaku usaha perikanan yang bebas dari kegiatan *destructive fishing*;
 - p) kapal perikanan yang laik operasi;
 - q) unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
 - r) unit usaha budidaya ikan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan;
 - s) usaha distribusi perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Program pengelolaan ruang laut sebesar Rp436.249.762.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
- a) penambahan luas kawasan konservasi;
 - b) pengelolaan efektif kawasan konservasi;
 - c) pemanfaatan kawasan konservasi;
 - d) perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatan keanekaragaman hayati laut;
 - e) pembangunan sarpras wisata bahari dan BMKT;
 - f) fasilitasi lahan garam;
 - g) pembangunan sarana niaga garam;
 - h) fasilitasi perizinan reklamasi baik pusat maupun daerah;
 - i) pengelolaan biofarmakologi;
 - j) infrastruktur kelautan dan perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - k) peningkatan ketangguhan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim;

- l) sertifikasi hak atas tanah pulau kecil/terluar;
 - m) rehabilitasi dan restorasi kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - n) validasi pembakuan nama;
 - o) dokumen rencana zonasi kawasan laut di perairan laut antar wilayah;
 - p) Rencana Zonasi di Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis nasional Tertentu (KSNT) yang ditetapkan melalui Peraturan perundang-perundangan;
 - q) provinsi yang memiliki rencana zonasi;
 - r) lanjutan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.
6. Program riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan sebesar Rp1.635.981.255.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
- a) pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
 - b) sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
 - c) tenaga penyuluh yang melakukan penyuluhan;
 - d) penyuluhan bagi kelompok pelaku utama/usaha;
 - e) pelatihan aparatur kelautan dan perikanan;
 - f) pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten;
 - g) standarisasi satuan pelatihan kelautan dan perikanan;
 - h) peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten;
 - i) standarisasi satuan pendidikan kelautan dan perikanan;
 - j) pendidikan aparatur KKP;
 - k) inovasi teknologi pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan;
 - l) data dan/atau Informasi Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP yang dihasilkan;
 - m) rekomendasi kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
 - n) model sosial ekonomi sektor kelautan dan perikanan;
 - o) kajian stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI yang dihasilkan;
 - p) kajian stok sumber daya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD) yang dihasilkan;
 - q) inovasi teknologi adaptif lokasi perikanan;

- r) inovasi teknologi perikanan yang diusulkan untuk direkomendasikan;
 - s) sarana prasarana riset perikanan;
 - t) inovasi teknologi perikanan yang diusulkan untuk direkomendasikan;
 - u) data dan /atau informasi riset perikanan yang dihasilkan;
 - v) pemetaan sumberdaya kawasan pesisir;
 - w) pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPP;
 - x) sarana prasarana riset kelautan;
 - y) sarana prasarana riset citra satelit dan radar;
 - z) inovasi teknologi adaptif lokasi garam;
 - aa) komponen inovasi kelautan yang dihasilkan;
 - bb) sarana prasarana stasiun bumi penerima data satelit;
7. Program karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebesar Rp529.720.397,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
- a) penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan;
 - b) sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi;
 - c) penetapan instalasi karantina ikan;
 - d) operasional pengawasan ekspor, impor dan domestik;
 - e) pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya;
 - f) sarana dan prasarana pengawasan karantina;
 - g) kasus penahanan dan penolakan ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan;
 - h) pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya;
 - i) operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan;
 - j) sarana dan prasarana pengujian mutu;
 - k) wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi;
 - l) penerapan standar sistem manajemen mutu;
 - m) kepatuhan pelaku usaha KP.

8. Program dukungan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kelautan dan perikanan sebesar Rp73.381.988,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
 - a) pengawasan akuntabilitas keuangan, meliputi pengawasan perencanaan kegiatan dan anggaran, pengawasan pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa, revidi laporan keuangan, serta evaluasi pemanfaatan aset;
 - b) pengawasan akuntabilitas non-keuangan, meliputi pengawasan kegiatan PSKPT, monitoring dan evaluasi rencana aksi GNP SDA sektor kelautan, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi, survei efektivitas kebijakan pengawasan, pengawasan tematik mitra, serta koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah dan pengawas eksternal; dan
 - c) peningkatan Integritas meliputi: audit tujuan tertentu, pemantauan tindak lanjut audit investigasi, sertifikasi profesi auditor, pengendalian gratifikasi, asistensi, dan evaluasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
9. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp523.438.939.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
 - a) layanan sumber daya manusia aparatur KKP;
 - b) layanan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, laporan keuangan, dan Barang Milik Negara KKP;
 - c) layanan perencanaan penganggaran, kinerja, dan pelaporan KKP;
 - d) layanan umum, kerumahtanggaan, pengelolaan administrasi dan arsip serta pengadaan barang/jasa;
 - e) layanan kerja sama dan humas;
 - f) penyusunan dan penyajian data statistik dan informasi data KKP, survei data perikanan, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - g) dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka pengelolaan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan;
 - h) pengelolaan modal bergulir usaha kelautan dan perikanan;

- i) dukungan penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Timi Martini

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 65/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN
 DAN PERIKANAN TAHUN 2019

RENCANA KERJA
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.483.013.769,0
032.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	-	-	523.438.939,0
032.01.01.2322	Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP			
032.01.01.2322.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.01.01.2322.957	Layanan Hukum	1	layanan	
032.01.01.2322.960	Layanan Manajemen Organisasi	1	layanan	
032.01.01.2322.961	Layanan Reformasi Birokrasi	1	layanan	
032.01.01.2322.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.01.01.2323	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur			
032.01.01.2323.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.01.01.2323.954	Layanan Manajemen SDM	1	layanan	
032.01.01.2323.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.01.01.2324	Pengelolaan Keuangan KKP			

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.01.01.2324.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.01.01.2324.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	layanan	
032.01.01.2324.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.01.01.2325	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga			
032.01.01.2325.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.01.01.2325.952	Layanan Perencanaan	1	layanan	
032.01.01.2325.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.01.01.2326	Pengelolaan Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa			
032.01.01.2326.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.01.01.2326.962	Layanan Umum	1	layanan	
032.01.01.2326.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	bulan	
032.01.01.2328	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri			
032.01.01.2328.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.01.01.2328.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	1	layanan	
032.01.01.2328.959	Layanan Protokoler	1	layanan	
032.01.01.2328.964	Layanan Kerjasama Internasional	1	layanan	
032.01.01.2328.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.01.01.2329	Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP			
032.01.01.2329.951	Layanan Sarana dan	1	layanan	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
	Prasarana Internal			
032.01.01.2329.963	Layanan Data dan Informasi	5	layanan	
032.01.01.2329.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.01.01.5281	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan			
032.01.01.5281.001	Layanan Pengelolaan Penyaluran Modal Usaha	1	layanan	
032.01.01.5281.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.01.01.5281.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.02.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP			73.381.988,0
032.02.03.2331	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP			
032.02.03.2331.021	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I	3	laporan	
032.02.03.2332	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP			
032.02.03.2332.021	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II	3	laporan	
032.02.03.2333	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP			
032.02.03.2333.021	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat III	3	laporan	
032.02.03.2334	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP			
032.02.03.2334.021	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV	3	laporan	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.02.03.2335	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V dan Pelaksana Pembangunan KP			
032.02.03.2335.021	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu lingkup KKP	5	laporan	
032.02.03.2336	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan			
032.02.03.2336.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	4	layanan	
032.02.03.2336.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.02.03.2336.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.12.05	Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			1.635.981.255,0
032.12.05.2375	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
032.12.05.2375.001	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	18.800	orang	
032.12.05.2375.002	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi	3.500	orang	
032.12.05.2375.003	Tenaga Penyuluh Yang Melakukan Penyuluhan	5.252	orang	
032.12.05.2375.004	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluhan	40.000	kelompok	
032.12.05.2375.005	Aparatur kelautan dan perikanan yang kompeten	1.560	orang	
032.12.05.2375.006	Satuan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang terstandar	7	unit	
032.12.05.2375.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1	layanan	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.12.05.2375.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	layanan	
032.12.05.2375.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.12.05.2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan			
032.12.05.2376.001	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	8243	Orang	
032.12.05.2376.002	Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar	9	unit	
032.12.05.2376.003	Pendidikan Aparatur KKP	216	orang	
032.12.05.2376.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	layanan	
032.12.05.2376.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.12.05.2378	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRSDM KP			
032.12.05.2378.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	layanan	
032.12.05.2378.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.12.05.2378.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	
		12	Bulan	
032.12.05.2425	Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan			
032.12.05.2425.001	Rekomendasi Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP yang dihasilkan	3	paket	
032.12.05.2425.002	Inovasi Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	6	paket	
032.12.05.2425.003	Data dan/atau Informasi Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP yang	3	paket	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
	dihasilkan			
032.12.05.2425.004	Sarana dan Prasarana Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	1	Paket	
032.12.05.2425.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	layanan	
032.12.05.2425.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	
		12	bulan	
032.12.05.2426	Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan			
032.12.05.2426.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan	8	paket	
032.12.05.2426.002	Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	6	paket	
032.12.05.2426.003	Sarana prasarana Riset Sosial Ekonomi KP	1	paket	
032.12.05.2426.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	layanan	
032.12.05.2426.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	bulan	
032.12.05.2427	Riset Perikanan			
032.12.05.2427.001	Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Riset Perikanan	12	paket	
032.12.05.2427.002	Kajian stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI yang dihasilkan	11	paket	
032.12.05.2427.003	Kajian Stok sumber daya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD) yang dihasilkan	6	paket	
032.12.05.2427.004	Komponen Inovasi Perikanan yang Dihasilkan	10	paket	
032.12.05.2427.005	Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan	3	inovasi	
032.12.05.2427.006	Sarana Prasarana Riset Perikanan	4	unit	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.12.05.2427.007	Inovasi Teknologi Perikanan yang Diusulkan untuk Direkomendasikan	4	paket	
032.12.05.2427.008	Data dan/atau Informasi Riset Perikanan yang Dihasilkan	8	paket	
032.12.05.2427.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	1	layanan	
032.12.05.2427.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	layanan	
032.12.05.2427.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.12.05.2428	Riset Kelautan			
032.12.05.2428.001	Rekomendasi Kebijakan Riset Kelautan yang dihasilkan	12	paket	
032.12.05.2428.002	Sentra Nelayan yang terbangun Sistem Informasi KP	100	paket	
032.12.05.2428.003	Kawasan Pesisir yang Terpetakan Sumberdayanya	12	kawasan	
032.12.05.2428.004	WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut	3	paket	
032.12.05.2428.005	Sarana Prasarana Riset Kelautan	2	unit	
032.12.05.2428.006	Sarpras Riset Citra Satelit dan Radar	300	scene	
032.12.05.2428.007	Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Garam	1	paket	
032.12.05.2428.008	Komponen Inovasi Kelautan yang dihasilkan	3	paket	
032.12.05.2428.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	1	layanan	
032.12.05.2428.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	layanan	
032.12.05.2428.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	bulan	
032.12.05.2428.009	Sarana Prasarana Stasiun Bumi Penerima Data Satelit	1	unit	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.03.06	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			619.122.765,0
032.03.06.2337	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
032.03.06.2337.035	Kapal perikanan yang memenuhi standar kelaikan	301	unit	
032.03.06.2337.041	Awak kapal perikanan yang tersertifikasi	5.400	orang	
032.03.06.2337.043	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan sertifikasi sarana penangkapan ikan	55	RSNI	
032.03.06.2337.044	Kapal perikanan yang terdaftar	10.500	unit	
032.03.06.2337.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
032.03.06.2337.057	Kapal perikanan yang terbangun termasuk di wilayah perbatasan	301	unit	
	a. Kapal perikanan <5 GT	300	unit	
	b. Kapal Perikanan 60 GT (1 unit)	1	unit	
032.03.06.2337.058	Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan	2.000	unit	
032.03.06.2337.059	Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	2.000	unit	
032.03.06.2337.060	Kapal perikanan yang operasional dan dihitung produktivitasnya	1.450	unit	
032.03.06.2337.062	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek keselamatan dan operasional	50	unit	
032.03.06.2337.063	Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan	12	lokasi	
032.03.06.2337.064	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mandiri	4	Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.03.06.2337.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.03.06.2337.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.03.06.2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			
032.03.06.2338.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
032.03.06.2338.093	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang diidentifikasi dan/atau ditingkatkan fasilitasnya	3	Lokasi	
032.03.06.2338.094	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang meningkat operasionalnya	80	Persen	
032.03.06.2338.095	Pelabuhan Perikanan yang menerapkan standar internasional	1	lokasi	
032.03.06.2338.096	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang diidentifikasi dan/atau ditingkatkan fasilitasnya	7	lokasi	
032.03.06.2338.097	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meningkat operasionalnya	80	persen	
032.03.06.2338.098	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang diidentifikasi dan/atau ditingkatkan fasilitasnya	10	lokasi	
032.03.06.2338.099	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang meningkat operasionalnya	70	Persen	
032.03.06.2338.100	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang diidentifikasi dan/atau ditingkatkan fasilitasnya	1	lokasi	
032.03.06.2338.101	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang meningkat operasionalnya	65	Persen	
032.03.06.2338.102	Pelabuhan Perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya	20	Pelabuhan Perikanan	
032.03.06.2338.103	Pelabuhan Perikanan yang dikelola Provinsi yang dilakukan pembinaan	34	Provinsi	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.03.06.2338.104	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Merauke yang Mandiri	4	Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	
032.03.06.2338.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	
032.03.06.2338.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	
		12	Bulan	
032.03.06.2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayan			
032.03.06.2339.034	Alokasi izin yang diberikan terhadap peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang tersedia	10.350	Unit	
032.03.06.2339.037	Realisasi Kapal terhadap alokasi dalam SIUP	6.200	Unit	
032.03.06.2339.038	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	34	Provinsi	
032.03.06.2339.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
032.03.06.2339.045	Nelayan yang terlindungi	170.000	Orang	
032.03.06.2339.046	Kredit perikanan tangkap yang difasilitasi	900	Nelayan	
032.03.06.2339.047	Rumah tangga perikanan yang melakukan diversifikasi usaha	1.900	Unit	
032.03.06.2339.048	Fasilitasi sertifikasi tanah nelayan yang dilaksanakan (T-1)	15.000	Bidang	
032.03.06.2339.049	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kelembagaannya menjadi koperasi	2.120	Kelompok	
032.03.06.2339.050	Fasilitasi Kawasan sentra /kampung nelayan yang tertata dan terintegrasi	40	Lokasi	
032.03.06.2339.051	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang Mandiri	4	Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	
032.03.06.2339.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.03.06.2339.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	
		12	Bulan	
032.03.06.2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan			
032.03.06.2341.040	Perairan yang dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya	11	WPP	
032.03.06.2341.043	Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya	11	WPP	
032.03.06.2341.045	Laut ZEEI yang dikelola sumber daya ikannya (WPP)	7	WPP	
032.03.06.2341.049	Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan	4.000	Unit	
032.03.06.2341.050	Kapal perikanan yang dipantau oleh Observer	300	Unit	
032.03.06.2341.051	Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya	21	PUD	
032.03.06.2341.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
032.03.06.2341.054	Kelembagaan Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	11	WPP	
032.03.06.2341.055	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Kabupaten Nunukan yang mandiri	4	Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	
032.03.06.2341.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	
032.03.06.2341.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.03.06.2342	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap			
032.03.06.2342.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	layanan	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.03.06.2342.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.03.06.2342.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.04.07	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			656.379.044,0
032.04.07.2344	Pengelolaan Perbenihan Ikan			
032.04.07.2344.002	Produksi induk unggul	1.097.400	ekor	
032.04.07.2344.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	layanan	
		12	Bulan	
032.04.07.2344.951	Layanan Internal (Overhead)			
032.04.07.2344.013	Operasional KJA Offshore/Unit Budidaya Lepas Pantai Terpadu yang dibangun/operasional	-	unit	
032.04.07.2344.014	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Rote, Kabupaten Rote Ndao yang mandiri	3	tingkat kemandirian (skala 1-5)	
032.04.07.2344.015	Unit Pembenihan Ikan yang direvitalisasi	32	unit	
	a. Peningkatan fasilitas unit pembenihan	14	unit	
	b. Bantuan sarana prasarana UPR Skala Rakyat	18	unit	
032.04.07.2344.017	Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat	47.625.155	ekor	
032.04.07.2344.018	Benih Bermutu Ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat	158.652.445	ekor	
032.04.07.2344.019	Benih Bermutu Ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat	7.625.000	ekor	
032.04.07.2344.021	Bantuan sarana prasarana dan percontohan perbenihan ikan	80	paket	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.04.07.2344.022	Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan	230	paket	
032.04.07.2345	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan			
032.04.07.2345.019	Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	37.785	sampel	
032.04.07.2345.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	layanan	
		12	bulan	
032.04.07.2345.020	Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan	2.620	paket	
	a. Monitoring residu	2.500	paket	
	b. Surveillance hama penyakit ikan	120	paket	
032.04.07.2345.021	Bantuan sarana prasarana dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan	30	paket	
	a. Excavator	20	paket	
	b. Pengelolaan Irigasi / Kawasan Tambak	10	paket	
032.04.07.2346	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan			
032.04.07.2346.008	Bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya	14.000	bidang	
032.04.07.2346.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	layanan	
		12	bulan	
032.04.07.2346.951	Layanan Internal (Overhead)			
032.04.07.2346.018	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Sumba Timur yang mandiri	3	tingkat kemandirian (skala 1-5)	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.04.07.2346.019	Luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi	5.000	hektar	
032.04.07.2346.023	Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	650	paket	
	a. Bantuan bioflok	250	Paket	
	b. Bantuan minapadi	400	paket	
032.04.07.2346.024	Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang produksi dan usaha	2.000	paket	
	Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	2.000	paket	
032.04.07.2348	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPB			
032.04.07.2348.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	layanan	
032.04.07.2348.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	
		12	bulan	
032.04.07.2348.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	
		12	Bulan	
032.04.07.5747	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan			
032.04.07.5747.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
		12	bulan	
032.04.07.5747.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	
		12	bulan	
032.04.07.5747.013	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kota Sabang yang mandiri	3	tingkat kemandirian (skala 1-5)	
032.04.07.5747.017	Produksi Pakan Mandiri Untuk Bantuan dan Operasional Budidaya di UPT	1.250	ton	
032.04.07.5747.021	Bantuan sarana prasarana dan percontohan pakan ikan mandiri	55	paket	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
	a. Bantuan mesin pakan mandiri	55	paket	
	b. Bantuan bahan baku pakan	55	paket	
032.04.07.5747.023	Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang pakan dan obat ikan	10	paket	
	Registrasi pakan dan obat ikan	10	paket	
032.06.08	Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			362.218.547,0
032.06.08.2356	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan			
032.06.08.2356.001	Pemetaan dan pemantauan logistik ikan	1	dokumen	
		12	bulan	
		1	layanan	
032.06.08.2356.002	Rancangan Regulasi tentang logistik ikan	1	dokumen	
		12	bulan	
032.06.08.2356.003	Kerjasama dalam mendukung ketersediaan ikan	6	dokumen	
032.06.08.2356.004	Kerjasama dalam mendukung serapan ikan	5	dokumen	
032.06.08.2356.005	Prasarana logistik ikan yang dibangun dan dimanfaatkan	19	unit	
	a. IFM 5 ton	8	unit	
	b. Dukungan Operasional Startup CS	1	paket	
	c. Cold Storage	11	unit	
032.06.08.2356.006	Sarana logistik ikan yang disediakan dan dimanfaatkan	28	unit	
	Kendaraan berpendingin	28	unit	
032.06.08.2356.007	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Timika, Kabupaten Mimika yang mandiri	4	Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.06.08.2356.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	
032.06.08.2356.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
		12	bulan	
032.06.08.2356.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	
		12	Bulan	
032.06.08.2357	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan			
032.06.08.2357.001	Akses pasar produk kelautan dan perikanan di negara tujuan ekspor yang ditingkatkan	1	negara	
032.06.08.2357.002	Promosi produk kelautan dan perikanan di pameran skala internasional	250	USD Juta	
032.06.08.2357.003	Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan/Gemarikan)	35	Mitra	
032.06.08.2357.004	Sarana dan prasarana pasar ikan yang dibangun	1	unit	
	a. Pasar Ikan Modern	1	unit	
	b. Operasional Startup Pasar Ikan Modern	1	paket	
032.06.08.2357.005	Menu inovasi masakan berbahan baku ikan yang dihasilkan	68	paket	
032.06.08.2357.006	Peralatan pemasaran yang disediakan dan dimanfaatkan	70	unit	
	Ice Flake Machine 1,5 ton	70	unit	
032.06.08.2357.008	Peta kebutuhan dan preferensi konsumen yang dihasilkan	1	dokumen	
032.06.08.2357.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.06.08.2356.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
		12	bulan	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.06.08.2357.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.06.08.2357.011	Pameran promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang diikuti satker daerah	34	Provinsi	
032.06.08.2358	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan			
032.06.08.2358.001	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) pengolahan dan pemasaran produk hasil KP yang disusun	16	RSNI	
032.06.08.2358.002	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan	2000	Sertifikat	
032.06.08.2358.003	Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina (Unit)	400	Unit	
032.06.08.2358.004	Utilitas Unit Penanganan dan Pengolahan Produk Hasil KP	65	%	
032.06.08.2358.005	Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina	28	Ragam	
032.06.08.2358.006	Sarana dan prasarana pengolahan hasil KP yang dibangun dan dimanfaatkan	300	unit	
	a. Integrated Cold Storage (ICS) 200-500 Ton	-	Unit	
	b. Sarana Sistem Rantai Dingin (SRD)	300	paket	
	c. Operasional Startup ICS	1	paket	
032.06.08.2358.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	
032.06.08.2356.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
		12	bulan	
032.06.08.2358.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
		12	Bulan	
032.06.08.2360	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan			
032.06.08.2360.002	Usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi	52	Pelaku Usaha	
032.06.08.2360.003	Debitur sektor KP yang mendapatkan layanan pembiayaan Bank dan Non Bank	61300	Debitur	
032.06.08.2360.004	Lembaga usaha hasil KP yang dibentuk dan dibina	15	Lembaga usaha	
032.06.08.2360.005	Pelaku usaha KP yang difasiltasi pelayanan usaha dan investasinya	53	Pelaku Usaha	
032.06.08.2360.009	Profil potensi usaha dan peluang investasi yang disusun	12	dokumen	
032.06.08.2360.010	Wirausaha Hasil KP yang dibentuk dan dibina	75	Pelaku Usaha	
032.06.08.2360.011	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten Biak Numfor yang mandiri	4	Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	
032.06.08.2360.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	
032.06.08.2356.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
		12	bulan	
032.06.08.2360.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	
		12	Bulan	
032.06.08.2360.012	Profil potensi usaha dan peluang investasi yang disusun di daerah	1	dokumen	
032.06.08.2361	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP			

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.06.08.2361.001	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP pada Satker Daerah	1	dokumen	
		12	Bulan	
032.06.08.2361.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	
032.06.08.2361.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	
032.06.08.2361.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	
		12	Bulan	
032.06.08.5279	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan			
032.06.08.5279.001	Ragam inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan	5	Ragam	
032.06.08.5279.002	Bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan	3	Bahan RSNI	
032.06.08.5279.003	Produk perikanan yang mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	7	Produk	
032.06.08.5279.004	Data uji nutrisi dan mutu produk perikanan yang dihasilkan	300	Data	
032.06.08.5279.005	Pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis	9	UMKM	
032.06.08.5279.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	
032.06.08.2356.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
		12	bulan	
032.06.08.5279.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	
		12	Bulan	
032.07.09	Program Pengelolaan Ruang Laut			436.249.762,0

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.07.09.2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut			
032.07.09.2362.010	Kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan di tingkat Nasional dan Daerah	700.000	Ha	
032.07.09.2362.011	Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif	35	Kawasan	
032.07.09.2362.012	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan	30	Kawasan	
032.07.09.2362.013	Keanekaragaman Hayati Laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	20	Jenis	
032.07.09.2362.014	Jejaring, Kemitraan dan Kerjasama Konvensi, yang Mendukung Pengelolaan Efektif Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	20	Jejaring/ Kemitraan/ Kerjasama Konvensi Konservasi	
032.07.09.2362.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
032.07.09.2362.016	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai Yang Mandiri	4	Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	
032.07.09.2362.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	Layanan	
032.07.09.2362.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	
		12	bulan	
032.07.09.2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan			
032.07.09.2363.011	Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dan BMKT	20	Kawasan	
032.07.09.2363.013	Lahan Garam yang difasilitasi	1.000	Ha	
032.07.09.2363.017	Sarana Niaga Garam Rakyat Yang Dibangun	6	Unit	
032.07.09.2363.018	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kep.Talaud yang Mandiri	4	Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.07.09.2363.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
032.07.09.2363.020	Fasilitasi perizinan reklamasi baik pusat maupun daerah	4	lokasi	
032.07.09.2363.021	Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut	1	dokumen	
032.07.09.2363.022	Pengelolaan Biofarmakologi	4	unit	
032.07.09.2363.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	
		12	Bulan	
032.07.09.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
032.07.09.2365.001	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	5	kawasan	
032.07.09.2365.002	Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkatkan ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	7	kawasan	
032.07.09.2365.003	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Morotai yang mandiri	4	Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	
032.07.09.2365.007	Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) pulau kecil/terluar	20	pulau	
032.07.09.2365.008	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direvitalisasi	5	komunitas	
032.07.09.2365.009	Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Pantura Jawa yang direhabilitasi	7	lokasi	
032.07.09.2365.010	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi	4	kawasan	
032.07.09.2365.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	layanan	
032.07.09.2365.013	Pulau Kecil yang Divalidasi Pembakuan Namanya	100	pulau	
032.07.09.2365.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	layanan	
032.07.09.2365.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
		12	Bulan	
032.07.09.2366	Perencanaan Ruang Laut			
032.07.09.2366.007	Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	1	dokumen	
032.07.09.2366.008	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi	4	perairan Laut	
032.07.09.2366.009	Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki rencana zonasi yang ditetapkan melalui peraturan perundangan	20	kawasan	
032.07.09.2366.012	Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan	12	provinsi	
032.07.09.2366.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	layanan	
032.07.09.2363.016	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri	3	Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	
032.07.09.2366.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.07.09.2363.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.07.09.2367	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPRL			
032.07.09.2367.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	layanan	
032.07.09.2367.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.07.09.2367.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.05.10	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			646.521.072,0

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.05.10.2350	Pemantauan dan Operasi Armada			
032.05.10.2350.001	Operasional Kapal Pengawas	84	hari operasi	
032.05.10.2350.002	Operasional Pesawat Patroli	84	hari operasi	
032.05.10.2350.003	Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi	502	Orang	
032.05.10.2350.004	Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi	34	Unit	
032.05.10.2350.005	Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	1	Sistem	
032.05.10.2350.006	Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	30	hari operasi	
032.05.10.2350.007	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1.010	Kelompok	
032.05.10.2350.010	Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	8	Unit	
032.05.10.2350.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	layanan	
032.05.10.2350.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.05.10.2350.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.05.10.2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan			
032.05.10.2351.001	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan korporasi/pemilik yang disidik secara akuntabel	1	kasus	
032.05.10.2351.002	Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel	150	kasus	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.05.10.2351.003	Barang Bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel	150	kasus	
032.05.10.2351.004	Nelayan yang difasilitasi pemulungannya dan pemberian pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain	100	orang	
032.05.10.2351.005	Forum Kerjasama Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	2	Forum	
032.05.10.2351.006	PPNS Perikanan/Aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan yang kompeten	63	Orang	
032.05.10.2351.007	Operasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal	4	Layanan	
032.05.10.2351.008	Data dan informasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) yang akuntabel	12	Data dan informasi	
032.05.10.2351.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
032.05.10.2351.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	
032.05.10.2351.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.05.10.2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan			
032.05.10.2352.001	Kawasan konservasi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan	17	kawasan	
032.05.10.2352.002	Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan	14	jenis ikan	
032.05.10.2352.003	Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	65	pelaku usaha	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.05.10.2352.004	Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	60	pelaku usaha	
032.05.10.2352.005	Pelaku usaha pemanfaat ruang laut nasional yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	105	pelaku usaha	
032.05.10.2352.006	Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Kompeten	50	Orang	
032.05.10.2352.007	Pelaku Usaha Perikanan yang Bebas Dari Kegiatan Destructive Fishing	270	pelaku usaha	
032.05.10.2352.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	layanan	
032.05.10.2352.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.05.10.2352.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.05.10.2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan			
032.05.10.2353.001	Kapal Perikanan yang Laik Operasional	17.100	Unit	
032.05.10.2353.002	Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan	575	Unit usaha	
032.05.10.2353.003	Unit usaha budidaya ikan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	443	Unit usaha	
032.05.10.2353.004	Usaha distribusi perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	352	Unit usaha	
032.05.10.2353.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	layanan	
032.05.10.2353.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.05.10.2353.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.05.10.2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP			
032.05.10.2355.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	layanan	
032.05.10.2355.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
032.05.10.2355.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.05.10.2355.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.13.11	Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			529.720.397,0
032.07.09.3987	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM			
032.07.09.3987.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			
032.07.09.3987.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.07.09.3987.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.07.09.3988	Karantina Ikan			
032.07.09.3988.001	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan	95	%	
032.07.09.3988.002	Sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi	86	Lokasi	
032.07.09.3988.004	Instalasi karantina ikan yang ditetapkan	425	unit	
032.07.09.3988.005	Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan	425	unit	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
	CKIB			
032.07.09.3988.009	Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik	12	Bulan	
032.07.09.3988.010	Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri	6	dokumen	
032.07.09.3988.011	Sarana dan prasarana pengawasan karantina	10	lokasi	
032.07.09.3988.015	Layanan Ketatausahaan Pusat Karantina Ikan	1	layanan	
032.07.09.3988.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	
032.07.09.3988.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	
032.07.09.3989	Pengendalian Mutu			
032.07.09.3989.002	Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor	1.750	register	
032.07.09.3989.004	Kasus penahanan dan penolakan ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	95	%	
032.07.09.3989.006	Pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya	30	lokasi	
032.07.09.3989.008	UPI yang menerapkan sistem traceability	130	UPI	
032.07.09.3989.010	Operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan	12	bulan	
		30	lokasi	
032.07.09.3989.011	Sarana dan prasarana pengujian mutu	33	lokasi	
032.07.09.3989.015	Layanan Ketatausahaan	1	layanan	
032.07.09.3989.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.07.09.3989.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2019		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.07.09.3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan			
032.07.09.3990.001	Laboratorium Acuan HPIK dan MKHP	1	Unit	
032.07.09.3990.004	Wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi	30	Lokasi	
032.07.09.3990.005	Penerapan standar sistem manajemen mutu	76	Standar	
032.07.09.3990.007	Kepatuhan Pelaku Usaha KP	80	%	
032.07.09.3990.015	Layanan Ketatausahaan	1	layanan	
032.07.09.3990.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	
032.07.09.3990.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	
		12	Bulan	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Biro Hukum dan Organisasi,



Tini Martini

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/PERMEN-KP/2018
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2019

RINCIAN KOMPONEN KEGIATAN UTAMA TAHUN 2019

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	SATUAN
I	DITJEN PERIKANAN TANGKAP		
1	Bantuan Kapal Perikanan:		
	- Kapal 5 GT dan < 5 GT	300	unit
	- Kapal 60 GT	1	unit
2	Bantuan Alat Penangkapan Ikan	2.000	unit
3	Bantuan Premi Asuransi Nelayan	170.000	orang
4	Fasilitasi Kampung Nelayan Percontohan yang dibangun oleh CSR Swasta/BUMN	40	lokasi
5	Fasilitasi SeHAT Nelayan (Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan)	15.000	bidang
6	Observer di atas kapal perikanan	300	unit
7	Partisipasi RFMO dan kerjasama perikanan tangkap	7	WPP

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	SATUAN
	internasional		
8	Logbook penangkapan ikan	4.000	unit
9	Kelompok Usaha Bersama (KUB) menjadi Koperasi	2.120	kelompok
10	Pelayanan pelabuhan perikanan UPT Pusat (Kesyahbandaran, SHTI, CPIB, ISO 14001, Pelayanan Usaha, Pendataan, dll)	22	lokasi
11	PPI yang diidentifikasi dan/atau ditingkatkan fasilitasnya	1	lokasi
12	Perekayasaan dan Rancangan Standar Nasional Indonesia(RSNI) dan uji terap API ramah lingkungan (BPPI Semarang)	55	RSNI
13	Perizinan dan permodalan (termasuk penyelesaian permasalahan perizinan, review perizinan, integrasi perizinan pusat-daerah, diversifikasi usaha nelayan, dll)	34	Provinsi
14	Pendaftaran kapal, penerbitan buku kapal, pemeriksaan fisik kapal, dan standarisasi sarana penangkapan ikan	10.500	unit
15	Sertifikasi awak kapal, perlindungan awak kapal perikanan, dan penerapan perjanjian kerja laut (PKL)	5.400	orang
16	Program SKPT		
	- SKPT Saumlaki	1	lokasi
	- SKPT Merauke	1	lokasi
	- SKPT Natuna	1	lokasi
	- SKPT Sebatik	1	lokasi
II	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA		
1	Bantuan Benih dan Calon Induk	215	juta ekor
2	Kebun Bibit RL	80	paket
3	Operasional Pabrik pakan skala medium	1.250	ton
4	Mesin dan bahan baku pakan	50	paket
5	PITAP	10	paket
6	Excavator	20	paket
7	Bioflok	200	paket
8	Minapadi	400	paket
9	Sarpras UPR dan HSRT	18	paket
10	Program SKPT		

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	SATUAN
	- SKPT Sabang	1	lokasi
	- SKPT Sumba Timur	1	lokasi
11	Pengujian Residu Produk Budidaya dan Sertifikasi untuk Ekspor	4.860	paket
12	Asuransi Usaha Budidaya	5.000	ha
III	DITJEN PDS		
1	Cold Storage (CS)	11	unit
2	IFM 5-10 ton	8	unit
3	IFM 1,5 TON	70	unit
4	Kendaraan berpendingin	25	unit
5	SRD/Chest freezer	300	unit
6	PIM	1	unit
7	Program SKPT		
	- SKPT Mimika	1	lokasi
	- SKPT Biak Numfor	1	lokasi
8	Gemarikan	35	paket
9	Pameran Internasional	250	USD Juta
10	Layanan STELINA, Layanan perekayasa penerapan dan pengujian produk hasil KP, Layanan sertifikasi kelayakan pengolahan, Layanan Rekomendasi Impor	1	paket
IV	DITJEN PRL		
1	Pelindung Pantai	7	lokasi
2	Dermaga Apung	5	lokasi
3	Pembakuan Nama Pulau	100	pulau
4	Sertifikasi Pulau Terluar	20	pulau
5	PUGAR	1.000	ha
6	Pencadangan kawasan konservasi dan konservasi kawasan perairan	700	ribu ha
7	Konservasi Jenis Ikan (penanganan mamalia terdampar, rekomendasi/ pemeriksaan terkait penjualan ikan dilindungi)	20	jenis
8	Program SKPT		

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	SATUAN
	SKPT Morotai	1	lokasi
	SKPT Talaud	1	lokasi
	SKPT Mentawai	1	lokasi
	SKPT Maluku Barat Daya (MOA)	1	lokasi
9	Bantuan KOMPAK	20	kelompok
10	Rencana Zonasi	36	RZ
11	Wisata bahari & BMKT serta fasilitasi perizinan dan reklamasi	24	lokasi
12	Penataan bangunan dan instalasi laut dan gerai biofarmakologi	5	unit
13	Gerakan cinta laut, Restorasi pesisir, masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di p4k	16	lokasi
V	DITJEN PSDKP		
1	Operasional Kapal Pengawas	84	hari
2	Operasional pesawat patroli	84	hari
3	Operasional Pemantauan SDKP	1	tahun
4	Operasional speedboat	30	hari
5	Operasional awak kapal pengawas	502	orang
6	Perawatan kapal pengawas	34	unit
7	Operasional Satgas	1	tahun
8	Penyidikan kasus dan penanganan barang bukti tindak pidana KP	150	kasus
9	Pembangunan prasarana pengawasan	8	unit
10	Supervisi dan operasional pengawasan kawasan konservasi, destructive fishing jenis ikan yang dilindungi, ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1.870	pelaku usaha
11	Operasional dan pembinaan Pokmaswas	1.010	kelompok
12	Pembentukan PPNS Perikanan dan Hakim Adhock Perikanan	63	Orang
VI	BRSDM KP		
1	Pendidikan KP	8.243	orang

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	SATUAN
2	Pendidikan Aparatur	216	orang
3	Pelatihan Masyarakat KP	18.800	orang
4	Pelatihan Aparatur KKP	1.560	orang
5	Sertifikasi Kompetensi KP	3.500	orang
6	Tenaga Penyuluh KP	5.252	orang
7	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluhan	40.000	kelompok
8	Stock assesment WPP	11 dan 6	WPP - PUD
9	Kajian/Rekomendasi KP	35	paket
10	Inovasi Teknologi KP	7	paket
11	Pembangunan Pusat Riset Kelautan	2	lokasi
12	Citra Radar Saelit (INDESO)	300	scene
VII	BKIPM		
1	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan	47	Satker
2	Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik	281	Lokasi
3	Sarana dan prasarana pengawasan karantina	10	Lokasi
4	Pengawasan mutu di sentra perikanan	30	Lokasi
5	Operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan	34	Propinsi
6	Sarana dan prasarana pengujian mutu	33	Lokasi
7	Laboratorium Acuan HPIK dan MKHP	1	Lab
8	Pengawasan di perbatasan	30	Lokasi
9	Akreditasi lembaga inspeksi, ISO 17010, 17025, 9001)	76	Paket
10	Sarana dan prasarana pelayanan	47	Lokasi
VIII	SETJEN		
1	Kerjasama Internasional	1	layanan
2	Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP	1	layanan
3	Pengelolaan SDM Aparatur KKP	1	layanan
4	Pengelolaan Keuangan KKP	1	layanan
5	Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama	1	layanan

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	SATUAN
	Antar Lembaga KKP		
6	Pengelolaan Administrasi dan Pengadaan Barang Jasa	1	layanan
7	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	1	layanan
8	Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi KKP	1	layanan
9	Operasional Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1	layanan
10	Kegiatan Dekonsentrasi yang Dilimpahkan ke Provinsi	34	provinsi
IX	ITJEN		
1	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I	1	layanan
2	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II	1	layanan
3	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat III	1	layanan
4	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV	1	layanan
5	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V	1	layanan
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya	1	layanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Timi Martini